

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Ariq Hikmal Athallah

NIM. 07011282126164

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

ARIQ HIKMAL ATHALLAH

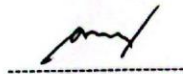
NIM. 07011282126164

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Tanggal

21 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG”

Skripsi

Oleh :

Ariq Hikmal Athallah
NIM. 07011282126164

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 02 Januari 2025

Pembimbing :

Drs. Mardianto, M.SI
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan

Penguji :

1. Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.SI
NIP. 198701052015041003

2. Riza Adelia Suryani, S.IP., M.SI
NIP. 198902222023212044

Tanda Tangan

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariq Hikmal Athallah
NIM : 07011282126164
Jurusan : Administrasi Publik
Kampus : Indralaya
Angkatan : 2021

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatukan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya,

Ariq Hikmal Athallah
NIM. 07011282126164

MOTO DAN PERSEMBAHAN

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

”Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi Walau pedihku bersamamu kali ini. Ku masih ingin melihatmu esok hari”

(Hindia)

”Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa dicapai”

(Windah Basudara)

”*Family is my fuel*”

(Penulis)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Rinando dan Ibu Ika Riva Permata Hati
2. Diri saya sendiri, Ariq Hikmal Athallah
3. Kedua Adik Perempuan saya, Khanza Hikmah Anastasya dan Kayla Thalita Sakira
4. Keluarga Besar
5. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
6. Seluruh Rekan Mahasiswa Administrasi Publik 2021
7. Almamater Kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRAC

This study analyzes the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Finance Sub-Division of the Public Works and Spatial Planning Agency of Palembang City using George C. Edward III's policy implementation theory. This study aims to evaluate the success of implementation based on four main factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study uses a qualitative descriptive approach with in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the study indicate that the implementation of SIPD faces obstacles such as lack of skilled human resources, inadequate infrastructure, and technical problems such as system and network errors. However, there is potential for improvement through training, strengthening the bureaucratic structure, and improving technology infrastructure. These findings provide recommendations for improving the effectiveness of SIPD in managing regional finances in a transparent, accountable, and efficient manner.

Keywords : Policy Implémentation, Regional Government Information System (SIPD), Regional Finance, George C. Edward III, Good Governance

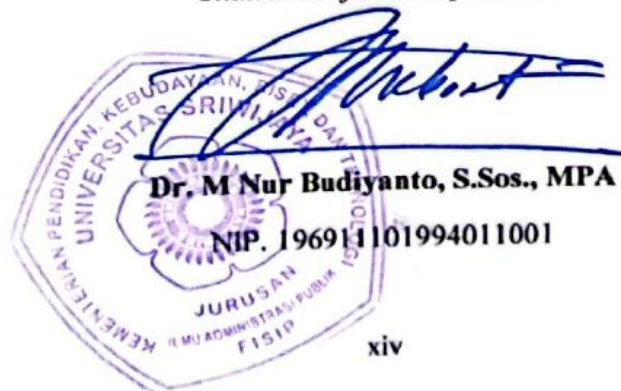
Advisor

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Mengetahui,

Chairman of The Departemen



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi berdasarkan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang tidak memadai, serta masalah teknis seperti error sistem dan jaringan. Namun, terdapat potensi peningkatan melalui pelatihan, penguatan struktur birokrasi, dan perbaikan infrastruktur teknologi. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Keuangan Daerah, George C. Edward III, Good Governance.

Pembimbing

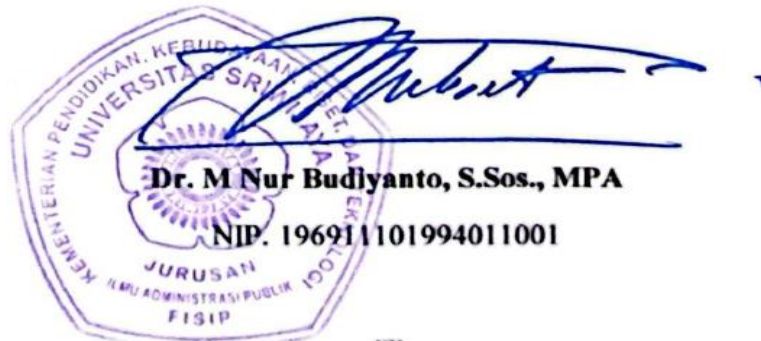
Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan dedikasi, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun, berkat doa dan dukungan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Sebagai anak pertama dan cucu pertama dalam keluarga, penulis merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur dan kebanggaan keluarga. Semangat dan doa dari keluarga, khususnya kedua orang tua, telah menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Selain itu, bantuan, saran, dan arahan dari pembimbing, dosen, serta rekan-rekan sangat membantu dalam menyempurnakan hasil karya ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rinando, S.T. dan Bunda Ika Riva Permata Hati, S.E., M.Si., yang dengan kasih sayang tanpa syarat, sabar yang tiada henti, dan doa yang dihaturkan di setiap saat, telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Tanpa mengenal lelah, mereka senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai, menjadikan harapan mereka sebagai pendorong dan tujuan dalam setiap usaha yang saya lakukan.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP.,S.H.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan dedikasi selama proses penyusunan penelitian skripsi. Setiap masukan dan saran yang Bapak berikan sangat berarti bagi saya dan telah membantu saya dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Bapak Ir. H. Akhmad Bastari, ST.,MT.,IPM.,ASEAN Eng, yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian.

9. Ibu Uswatun Hasanah, SE., MM yang telah membantu untuk penelitian di divisi keuangan Dinas PUPR Kota Palembang
10. Seluruh pegawai di Divisi Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang, yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat kerjasama mereka, kami dapat mengumpulkan data penelitian dengan optimal.
11. Kedua saudari tercinta, Khanza Hikmah Anastasya dan Kayla Thalita Sakira, yang selalu menjadi sumber dukungan, hiburan, dan moodbooster. Mereka menjadi sosok yang tak ternilai bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama masa studi, kehadiran mereka senantiasa mampu mengusir rasa lelah dan memberikan kekuatan baru untuk terus melangkah.
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik yang telah menjadi tempat berbagi cerita, motivasi, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman MAYAN yang telah menjadi keluarga kedua penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan. Terima kasih untuk kebersamaan, tawa, diskusi, dan saling menyemangati di saat lelah. Kehadiran kalian membuat perjalanan akademik ini lebih ringan dan bermakna.
14. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seseorang yang istimewa, yang selalu memberikan dukungan, cinta, doa, dan semangat tanpa henti. Kehadiranmu menjadi sumber motivasi besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertianmu selama ini.

15. Terima kasih kepada Fore Ryacudu, Perpustakaan Daerah, Le Garden PIM, Rumah Loer, Mcd Sukamto, dan Kamar saya yang menjadi tempat dan saksi bisu dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini
17. Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan hati, kerja keras, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun banyak tantangan di perjalanan ini. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Di akhir tulisan ini, penulis juga berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Palembang, 07 Januari 2025

Ariq Hikmal Athallah
NIM. 07011282126164

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Impelementasi Kebijakan	8
2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan.....	11
2.1.3. Teori Yang Digunakan	19
2.2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	21
2.2.1. Sistem Informasi	21
2.2.2. Pemerintahan Daerah.....	22
2.2.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	23
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Definisi Konsep.....	40
3.3. Fokus Penelitian	41
3.4. Informan Penelitian	43

3.5. Jenis dan Sumber Data	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Teknik Analisis Data.....	47
3.8. Jadwal Penelitian	49
3.9. Sistematika Penulisan.....	50
BAB IV	52
PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	52
4.2 Informan Penelitian	57
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	58
4.3.1 Komunikasi.....	59
4.3.2 Sumber Daya.....	64
4.3.3 Disposisi.....	68
4.3.4 Struktur Birokrasi	70
BAB V	82
PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	lxxix

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	44
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3. 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (1992).....	47
Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian.....	54
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota PAlembang.....	57
Gambar 4. 3 Informan Penelitian.....	57
Gambar 4. 4 Tampilan Login SIPD.....	61
Gambar 4. 5 Tampilan Menu SIPD.....	61
Gambar 4. 6 Panduan-Panduan Dalam Aplikasi SIPD	63
Gambar 4. 7 Salah Satu Pegawai Menggunakan Laptop Pribadi Untuk Menjalakan SIPD	67
Gambar 4. 8 Manual Book SIPD	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	lxxxii
Lampiran 2. Pedoman Observasi	lxxxiv
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi.....	lxxxv

DAFTAR SINGKATAN

SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENJA-PD	: Rencana Kerja dan Anggaran-Pembangunan Daerah
RENSTRA-PD	: Rencana Strategis Pembangunan Daerah
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PERDA	: Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sistem informasi pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2016:35), "Implementasi e-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien."

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengelola data pembangunan daerah. Sistem ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah. Tujuan utama SIPD adalah memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi di tingkat pemerintahan daerah. Sejumlah peraturan hukum telah diterbitkan terkait dengan implementasi sistem ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Peraturan di atas mengharuskan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban menyediakan data dan informasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memberikan informasi terkait pemerintahan, termasuk informasi mengenai pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, semua informasi tersebut harus dikelola dalam sebuah sistem informasi pemerintahan daerah. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akan diolah dan disajikan dalam format informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menyatukan referensi nasional. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan dan keuangan daerah secara eksternal, serta meningkatkan evaluasi atas perencanaan keuangan, kinerja, dan produk hukum yang dilakukan melalui platform tersebut. Dengan adanya SIPD, pengelolaan database pembangunan baik nasional maupun daerah, serta analisis data daerah di tingkat nasional, dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah dapat ditingkatkan dengan mengadopsi beberapa prinsip utama yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan, rasa tanggung jawab yang berlandaskan pada asas keadilan untuk masyarakat, keterlibatan aktif, dan kepatuhan pada aturan yang ada (Muslih et al., 2020).

Seiring dengan reformasi birokrasi yang berlangsung, pengelolaan keuangan daerah kini dapat dilakukan melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang didukung oleh teknologi sistem informasi manajemen yang canggih. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat, dan transparan (Wartini dan Yasa, 2016). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, penting untuk mengembangkan strategi yang merancang prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan lebih terarah dan efisien (Ekaputra, 2021).

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur, yang mencakup jalan, jembatan, drainase, dan penataan ruang kota. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Dinas PUPR sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Khususnya pada Sub Bagian Keuangan, memiliki peran strategis dalam

pengelolaan anggaran dan keuangan daerah yang memerlukan pengelolaan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Salah satu mekanisme yang memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam mengelola data pembangunan daerah, keuangan, dan aspek pemerintahan lainnya adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem informasi berbasis web yang menyediakan data terkini dan dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri. SIPD dirancang untuk mempermudah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan informasi dalam bentuk dokumentasi dan administrasi, serta mengelola data pembangunan daerah. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Wurara et al. , 2020).

Penerapan aplikasi SIPD telah dilakukan di seluruh Indonesia sejak pertengahan tahun 2020, yang dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021. SIPD berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik, yang mendukung transparansi informasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, serta pencapaian pembangunan yang dihasilkan. (Sudianing & Seputra, 2019).

Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang, sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pratama (2021:156) menyatakan bahwa sub bagian keuangan pada instansi pemerintah memerlukan sistem informasi yang dapat:

1. Mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan
2. Menyediakan data yang akurat dan real-time
3. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan regulasi tersebut, Pemerintah Kota Palembang telah menginisiasi program "Palembang Smart City 2024" yang salah satu fokusnya adalah digitalisasi sistem keuangan daerah.

Penggunaan aplikasi web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah, khususnya di Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Namun, untuk dapat merealisasikan program ini tidak mudah, diperlukan kerjasama dan kerja keras, berdasarkan observasi awal. penulis melihat beberapa kendala seperti: keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan dikarenakan masalah *error* sistem, kendala jaringan internet, dan proses pengelolaan keuangan yang masih menggunakan kombinasi sistem manual dan digital sehingga proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang menjadi terhambat.

Hal ini sejalan dengan temuan Prakoso (2021:78) yang menyatakan bahwa 72% instansi pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Sementara itu, Susilawati dan Hendri

(2019:92) menegaskan bahwa Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang bersifat strategis dan mendesak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan 4 faktor keberhasilan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi terkini implementasi SIPD serta tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya yaitu ”Bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada sub bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan, dalam hal ini khususnya ilmu administrasi publik, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan, khususnya dalam memahami Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Sub bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang Bahan informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 Nomor 1, 4036–4043.
- Asyaroh, S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Terhadap Manajemen Data dan Informasi Perencanaan. *Journal Of Regional Public*
- Citta Nadya C.W, Alfon K & Neni K, 2020. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado), *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 5.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. (R. L. Peabody, Ed.). Washington, D.C.: Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. Retrieved from <https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/page/n3/mode/1up>
- Ekaputra, D. (2021). Strategi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 45-56.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Cv Budi Utama.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi*. APTIKOM.
- Lumabi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan. *JURNAL POLITICO*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muslih, M., Sari, D. P., Hardianto, F., & Kamil, I. (2020). Pentingnya penerapan manajemen keuangan dalam pengelolaan dana desa. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 223-228.

- Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Indonesia
- Prakoso, B. (2021). Analisis implementasi sistem informasi keuangan daerah: Tantangan dan solusi di era digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(2), 75-89.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*. Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan modelmodel implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara (Vol. 77).
- Pratama, I. P. A. E. (2021). Sistem informasi dan implementasinya: Berbasis digital government. *Informatika*.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4). <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Subarsono, A. . (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar.
- Sudianing, N. N., & Seputra, I. D. G. D. (2019). Pengaruh implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 143-157.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.
- Susilawati, E., & Hendri, D. (2019). Implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah: Perspektif teknologi dan kebijakan. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 8(2), 85-98.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.) (1st ed.). Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung. Retrieved from https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
- Wahyudi, A. (2022). Efektivitas implementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 145-160.
- Wartini, S., & Yasa, I. N. P. (2016). Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Jembrana. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3), 1-12.
- Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 232.

- Winarno, P., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 2. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.500>
- Wurara, M., Wokas, H. R. N., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 226-233.